

PENGARUH PAD DAN DAU TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR

Kiki Ninda Apriliawati
Kikininda980@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to examine whether the PAD and the DAU has influence to the local expenditure in the Districts / Cities Government in East Java Province and to analyze the possibility of the occurrence of flypaper effect to the Local Expenditure in the Districts / Cities Government in East Java Province in 2012-2014 periods. The population is all districts / cities in the area of East Java Province. The data employs the secondary data which has been obtained from the Budget Realization Statement of Districts / Cities in East Java Province from 2012 to 2014 which have been obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK. RI). The representatives from East Java province is in the form of the Result of Financial Audit Report of Districts / Cities in East Java Province. The data analysis instrument which has been employed in this research is the multiple linear analyses. Based on the result of the test, it shows that: 1) the Local Own Source Revenue has positive influence to the Local Expenditure in the districts / cities government in East Java Province; 2) The General Allocation Fund has positive influence to the Local Expenditure in the districts / cities government in East Java Province; 3) The flypaper effect has occurred in the districts / cities government in East Java Province.

Keywords: Local Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Flypaper Effect.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk munguji apakah PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2014 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK. RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier Berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 3) Telah terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), *flypaper effect*.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pelimpahan wewenang di bidang penerimaan

anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut (Setiawan, 2010:16). Sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam membiayai berbagai macam kegiatan operasionalnya, hal tersebut yang menimbulkan terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah. Dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari dana APBN. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mentransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Sumber daya alam. Penggunaan semua dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Logan (dalam Adi dan Ekaristi, 2009:5) menjelaskan tujuan pemberian bantuan transfer adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dalam periode mendatang dapat mengurangi transfer. Hal ini berarti pemberian transfer seharusnya mampu mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelanjaan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan kemandirian daerah (dalam konteks negara Indonesia, transfer dapat diidentikkan dengan DAU dan kemandirian daerah ditunjukkan dengan PAD).

Pada perkembangannya, tingkat kemandirian Pemerintah Daerah justru tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah Daerah justru lebih menggantungkan diri pada dana transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Bila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat mendorong pemerintah daerah melakukan Belanja Daerah lebih besar. Kebijakan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Nanga (dalam Adi dan Ekaristi, 2009:7) justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah. Hal ini disebabkan daerah akan mendapatkan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik (yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PAD). Daerah tentu saja lebih memilih mengupayakan perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar daripada bekerja keras agar terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mengakibatkan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? (2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? (3) Apakah terdapat kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (2) Untuk menguji pengaruh Dana

Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (3) Untuk menganalisis kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah dimulai sejak awal Januari 2010 dengan membawa implikasi pada pelimpahan wewenang antara Pusat dan Daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan terkait yang tertuang dalam Undang-Undang yang telah diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri dengan menggali potensi lokal dalam sektor pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proposional, yang berarti bahwa pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan, dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi daerah diberikan bukan tanpa pertimbangan. Pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan yaitu bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan sendiri tanpa mengurangi bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan diharapkan agar lebih mampu mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam PP No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. struktur anggaran Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut dengan PAD dapat dikatakan sebagai Pendapatan Daerah yang diperoleh dengan cara mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam wilayah Daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari empat jenis pendapatan yang terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009, terdapat dua jenis pajak, yaitu Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas lima jenis Pajak yaitu: 1) Pajak kendaraan bermotor, 2) Bea balik nama kendaraan bermotor, 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4) Pajak air permukaan, dan 5) Pajak rokok. Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota terdiri atas sebelas jenis pajak yaitu: 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak mineral bukan logam dan bantuan, 7) Pajak parkir, 8) Pajak air tanah, 9) Pajak sarang burung waket, 10) Pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Daerah, terdiri dari tiga jasa antara lain: (1) Jasa Umum, (2) Jasa Usaha, dan (3) Perizinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada Daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan Daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun cara menghitung DAU: 1) Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Neto; 2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar; dan 3) DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangannya yaitu 10% untuk Daerah Provinsi dan 90% untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut UU 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan dua kelompok belanja, yaitu yang pertama belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung dibagi menjadi tiga jenis belanja yang terdiri dari: (a) Belanja pegawai (honorarium/upah), digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah; (b) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan yang ke belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Kelompok Belanja Langsung dibagi menurut jenis belanjanya yang terdiri atas: (a) Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (b) Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; (c) Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk

atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; (d) Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; (e) Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (f) Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (g) Belanja keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemertaan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; dan (h) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Penelitian Terdahulu

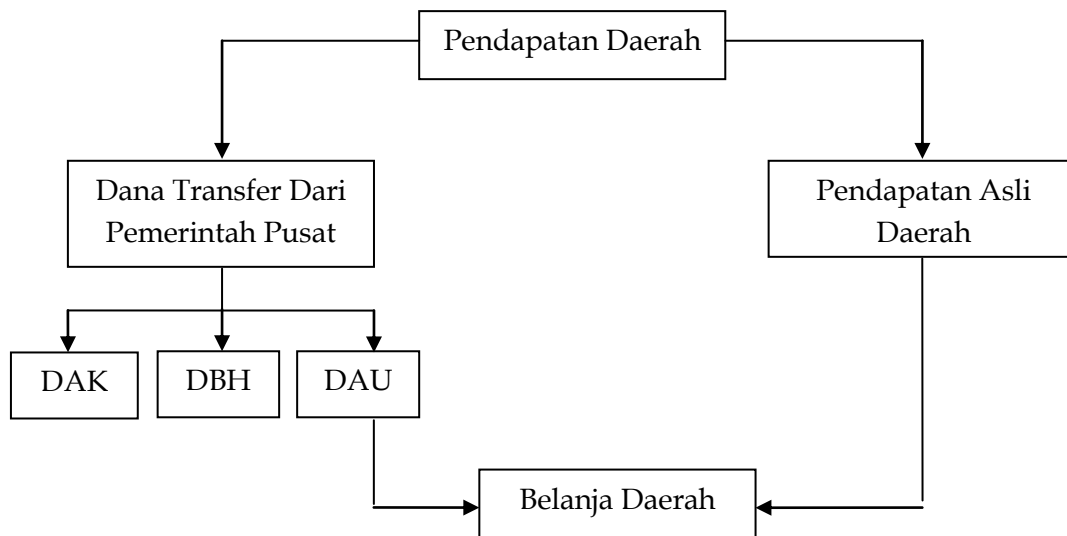
Maimunah (2006) meneliti tentang “*Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Namun, DAU lebih dominan dalam mempengaruhi besarnya nilai Belanja Daerah yang berarti terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Siagian (2009) melakukan penelitian yang serupa pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh antara PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Anggraeni dan Suhardjo (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2006”. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa DAU dan PAD baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Yang artinya, jika ada peningkatan jumlah DAU, akan terjadi peningkatan pada jumlah Belanja Pemda. Begitu pula dengan PAD, jika ada peningkatan jumlah PAD, maka akan terjadi peningkatan pada jumlah Belanja Pemda.

Kuncoro (2007) meneliti tentang “Fenomena *Flypaper effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia”. Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya setidaknya dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini mengklarifikasi keterkaitan langsung antara penerimaan transfer dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Kedua, mengamati sensitivitas belanja pemerintah daerah dalam merespon perolehan transfer. Ketiga, dengan merangkum kedua aspek tersebut ke dalam satu kerangka kerja dengan memperhatikan eksternalitas fiskal (*budget spillover*), baik sisi penerimaan dan belanja, yang muncul secara timbal balik antardaerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan alokasi transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah diikuti dengan penggalan PAD yang tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah bertindak reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Terdapat indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi belanja pemerintah daerah. Dengan kata lain, ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pusat akan semakin meningkat.

Masdjojo dan Sukartono (2009) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dan Analisis *Flypaper effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap BD dan diterima secara signifikan sedangkan DAK

berpengaruh positif terhadap BD namun tidak signifikan. Dan telah terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

PAD merupakan indikator kemandirian suatu daerah oleh karena itu PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi daerah yang baik. (Anggraeni dan Suhardjo, 2010; Maimunah, 2006; Masdjojo dan Sukartono, 2009) menyatakan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan. Dengan kata lain jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. DAU bisa disebut dengan bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Junaidi (2012:47) secara empiris membuktikan bahwa belanja pemerintah daerah di Indonesia terlalu responsif atas kenaikan DAU, dibandingkan kenaikan PAD terutama dari pajak daerah. Pemerintah daerah selaku penerima DAU bereaksi secara asimetri atas peningkatan nilai DAU yang diterima. Bila DAU meningkat dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni dan Suhardjo, 2010; Maimunah, 2006; Masdjojo dan Sukartono, 2009) yang menyatakan bahwa peningkatan DAU diikuti dengan

peningkatan yang lebih besar pada Belanja Daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Flypaper Effect

Flypaper effect atau yang lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi dimana komposisi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya lebih banyak bersumber dari DAU daripada PAD. Prakosa (2004:113) membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding dengan daya prediksi PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni dan Suhardjo, 2010; Maimunah, 2006; Masdjojo dan Sukartono, 2009). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengacu pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka, yang kemudian dilakukan analisis data dengan prosedur statistik, dan kemudian dipaparkan secara sistematis. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dan objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2014.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten, lengkap, dan jelas dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK. RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (BUKU 1). Teknik Pengumpulan data sekunder ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) Variabel Dependen yaitu Belanja Daerah. (2) Variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan wilayah daerah itu sendiri dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhannya operasionalnya. Belanja Daerah (BD) adalah Pengeluaran daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normalitas data dapat diuji dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* Jika tingkat signifikansi $> 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal. Pendekatan grafik dengan menggunakan

Normal Probability Plot (P-P Plot Of Regression Standardized Residual), dengan syarat data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y.

Uji Multikolinieritas

Menurut Suliyanto (2011) terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah multikolinieritas, yaitu dengan menggunakan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*). VIF menyatakan tingkat pembengkakan varians. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terdapat Multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda. Namun, jika nilai VIF-nya lebih rendah dari angka 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala Multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Durbin-Watson* (Uji DW). Cara pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi bila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik yang dilakukan dengan mengamati *scatterplot*. Jika *scatterplot* menyebar secara acak menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk, dan sebaliknya, jika *scatterplot* membentuk pola tertentu maka menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Kesesuaian Model (*Goodnes Of Fit*)

Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA) yang dapat dilihat pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan melihat nilai *p-value* atau *level of significant* yaitu 5% atau 0,05. Prosedur pengujian kesesuaian model yaitu sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi (*p-value*) < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi (*p-value*) > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi R² atau *Adjusted R² (R² adj)* memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini model regresi yang digunakan adalah Regresi linier berganda yaitu regresi dimana lebih dari satu variabel penjelas, atau variabel bebas yang digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tak bebas. Adapun model regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$BD = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \varepsilon$$

Keterangan: BD = Belanja Daerah, a = Konstantan regresi, $\beta_1; \beta_2$ = Koefisien regresi, PAD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah, DAU = Jumlah Dana Alokasi Umum, ε = Error term.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi (Uji Statistik t)

Pengujian hipotesis ini menggunakan Uji t yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat

signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu: (1) Pengujian Hipotesis (H_1): Jika nilai signifikansi uji $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD). (2) Pengujian Hipotesis (H_2): Jika nilai signifikansi uji $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD). (3) Pengujian Hipotesis (H_3): Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *flypaper effect* dengan melihat hasil uji t apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini maka dapat disimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect*. Adapun kriterianya sebagai berikut: 1) Apabila variabel Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan. 2) Dengan membandingkan nilai hasil uji t antara Dana Alokasi Umum dengan nilai hasil uji t Pendapatan Asli Daerah. Jika hasil t -hitung Dana Alokasi Umum lebih besar dari hasil t -hitung Pendapatan Asli Daerah berarti telah terjadi *flypaper effect*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa. Ibukota provinsi Jawa Timur terletak di Surabaya. Luas wilayah Jawa Timur sebesar 47.922 km². Wilayah Jawa Timur membentang antara 111° 0' BT - 114° 4' BT dan 7° 12' LS - 8° 48' LS. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota.

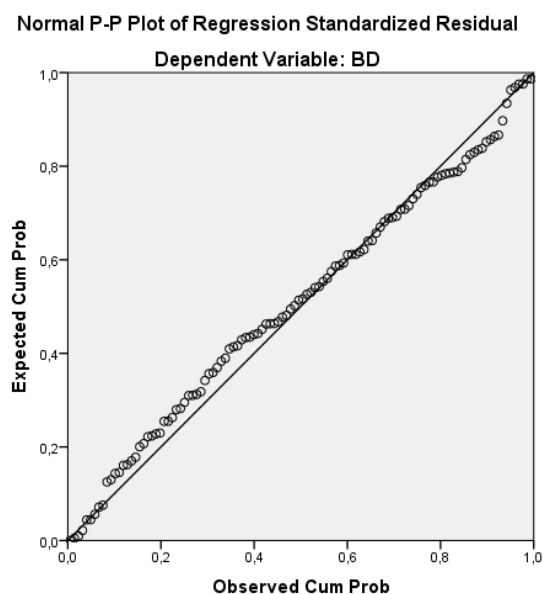
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Normalitas data dapat menggunakan metode analisis grafik dan metode statistik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kedua metode tersebut:

Uji Normalitas Data dengan Analisis Grafik

Pada grafik *P-plot* distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan distribusi dari data digambarkan dengan *ploting*. Jika data berdistribusi normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Gambar 2 berikut ini menyajikan grafik *P-plot* yang dapat menggambarkan distribusi data:



Gambar 2
Grafik *P-plot*
Sumber: Output SPSS

Dari grafik *normal probability plot* diatas setelah dilakukan transformasi data, terlihat bahwa penyebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal dan penyebarannya merapat di sekitar garis diagonal yang menunjukkan bahwa data yang diuji telah berdistribusi normal atau model regresi yang digunakan layak dipakai.

Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*

Pengujian normalitas data dengan analisis grafik memberikan hasil yang subyektif, sehingga kita perlu melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* untuk memastikan apakah data yang diuji telah berdistribusi secara normal. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* yang disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,99111093
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,067
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS.

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal karena nilai signifikansi yang dilihat dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 diatas nilai signifikansi yang telah diasumsikan sebelumnya yaitu sebesar 0,05.

Uji Multikolinieritas

Dalam menguji multikolinieritas model regresi dapat menggunakan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terdapat multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda. Berikut ini output dari SPSS 22 mengenai hasil analisis multikolinieritas menggunakan nilai VIF:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance
Model	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	15,956	,392		40,690	,000		
PAD	,217	,022	,369	9,657	,000	,608	1,644
DAU	1,191E-9	,000	,674	17,655	,000	,608	1,644

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS.

Dari hasil output SPSS yang disajikan pada tabel 2 terlihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari kedua variabel yaitu PAD dan DAU memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 1,644. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel independen.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi di dalam model regresi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dengan ketentuan apabila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Tabel 3 akan menunjukkan hasil uji autokorelasi:

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

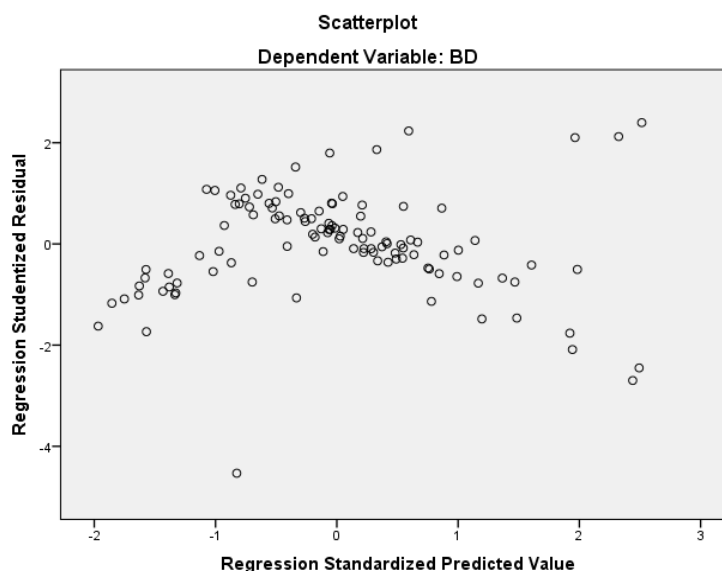
Model Summary^b					
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,950 ^a	,902	,14921	,830	

Predictors: (Constant), DAU, PAD
Dependent Variable: BD
Sumber: Output SPSS.

Dari tabel 3 terlihat bahwa nilai statistik *Durbin-Watson* yang dihasilkan sebesar 0,830. Berdasarkan asumsi ketentuan diatas nilai D-W yang dihasilkan berada diantara -2 sampai +2 yang berarti bahwa data yang diuji tidak mengandung atau bebas autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot*. Jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Grafik *scatterplot* disajikan pada gambar 4 berikut ini:



Gambar 3
Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan tampilan pada grafik scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Kesesuaian Model (*Goodnes Of Fit*)

Goodnes of fit dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel analisis varian (ANOVA) dari hasil output SPSS dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan kriteria pengujian, jika nilai p-value $> 0,05$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan, jika nilai p-value $\leq 0,05$, maka ada pengaruh yang signifikan. *Goodnes Of Fit* digunakan untuk menguji apakah secara simultan PAD, DAU berpengaruh terhadap BD. Berikut ini Output hasil perhitungan dari *goodnes of fit*:

Tabel 4
Hasil Perhitungan *Goodnes Of Fit*

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,636	2	11,318	508,351	,000 ^b
	Residual	2,471	111	,022		
	Total	25,107	113			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan tabel ANOVA diatas dapat diketahui bahwa hasil uji F menunjukkan nilai sebesar $0,000 \leq 0,05$, berarti ada pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digunakan mampu menjelaskan fenomena yang dianalisis dan seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (BD).

Koefisien Determinasi R^2

Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini besarnya kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh variabel independen yaitu PAD dan DAU terhadap variabel dependennya yaitu BD dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi *Adjusted R² (R² adj)*. Alasan peneliti menggunakan pengukuran dengan *Adjusted R² (R² adj)*, karena nilai *Adjusted R² (R² adj)* dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Berikut ini hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	,950 ^a	,902	,900	,14921		

Predictors: (Constant), DAU, PAD

Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan analisis diatas diperoleh besarnya *Adjusted R Square* dengan angka yang cukup besar yaitu sebesar 0,900 atau 90% yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Belanja daerah. Sedangkan sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil estimasi koefisien Regresi

Coefficients^a						
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	15,956	,392		40,690	,000
	PAD	,217	,022	,369	9,657	,000
	DAU	1,191E-9	,000	,674	17,655	,000

Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS.

Dari hasil output SPSS 22 seperti yang pada tabel 6 diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BD = 15,956 + 0,217PAD + 0,000000001191DAU + \epsilon$$

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan output hasil olah data SPSS 22 uji t ditunjukkan dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	15,956	,392		40,690	,000
	PAD	,217	,022	,369	9,657	,000
	DAU	1,191E-9	,000	,674	17,655	,000

Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS.

Dari tabel 7 diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PAD sebesar 9,657 dan untuk variabel DAU sebesar 17,655. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai signifikansi. Pada tabel *Coefficients* bahwa nilai *Sig.* dari kedua variabel sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki tingkat signifikansi yang sangat tinggi yang berarti bahwa kedua variabel independen yaitu PAD dan DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

PEMBAHASAN

PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni dan Yohanes, 2010; Maimunah, 2006; Masdjojo dan Sukartono, 2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan

Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Alasan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah daerah itu sendiri. Karena PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai kemandirian suatu daerah dan tolok ukur untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dituntut untuk menggali potensi-potensi yang berasal dari wilayahnya sendiri agar dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.

DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah pusat maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni dan Yohanes, 2010; Junaidi, 2012; Maimunah, 2006; Masdjojo dan Sukartono, 2009) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan operasional daerah. Dana Alokasi Umum meningkatkan belanja daerah karena setiap Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai belanja pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu meningkat hal ini juga menyebabkan peningkatan pada Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah (BD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Flypaper Effect merupakan respon pemerintah daerah dalam menggunakan Dana Alokasi Umum yang lebih besar daripada Pendapatan Asli daerah untuk membiayai belanja daerahnya. Sesuai dengan kriteria yang kedua, *flypaper effect* dapat diketahui dengan membandingkan nilai hasil uji t dari masing-masing variabel independen dapat disimpulkan bahwa rata-rata telah terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maimunah, 2006; Prakosa, 2004; Masdjojo dan Sukartono, 2009) yang menunjukkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum lebih dominan daripada Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja Daerah. Tidak semua pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki basis pajak daerah yang rendah, namun ada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang penerimaan pada sektor Pendapatan Asli Daerah sudah tinggi seperti Kota Surabaya yang dari tahun 2012 hingga tahun 2014 Pendapatan Asli Daerahnya selalu meningkat. Terjadinya *flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur disebabkan karena peranan Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Karena basis pajak di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih terbatas hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi seperti pengembangan wisata dan pembangunan pabrik di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak seimbang sehingga pajak di beberapa Kabupaten/Kota masih relatif rendah. Selain itu, sedikitnya jumlah wajib pajak dan masih rendahnya tingkat kepatuhan

masyarakat dalam membayar pajak juga mempengaruhi rendahnya basis pajak di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada tahun 2012-2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (3) Telah terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berarti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya hal ini dibuktikan dengan penggunaan Dana Alokasi Umum yang lebih dominan daripada Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada tahun 2012-2014 maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum dicantumkan dalam penelitian ini misalnya saja variabel SILPA, PDRB, dan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P., H. dan P. D. Ekaristi. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6(1): 1-19.
- Anggraeni, U., D. Dan Y. Suhardjo. 2010. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *SOLUSI* 9(1): 69-81.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. BPR RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. BPR RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. BPR RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Junaidi. 2012. Asimetri pada *Flypaper Effect*: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12(1): 45-55.
- Kuncoro, H. 2007. Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. 2007. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makasar.

- Maimunah, M. 2006. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Masdjoko, G., N. dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2007. *TEMA* 6(1): 32-50.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta.
- _____. Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Prakosa, K., B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI* 8(2): 101-118.
- Setiawan, A. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Siagian, P., A. 2009. *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi. Medan.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.